

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, JUMLAH ANGGOTA LEGISLATIF  
DAN OPINI AUDIT BPK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2011-2015**

**Mutiara Madelia<sup>1)</sup>, Sri Rahayu<sup>2)</sup>, Yudi<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun Tahun 2017*  
<sup>2&3)</sup>*Dosen Pembimbing*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of local government characteristics, number of legislative members, and BPK audit opinion on the level of disclosure of Local Government Financial Report (LKPD) in Jambi Province. Characteristic variables of local government are proxied with local revenue, level of dependence on central government, total assets, and administrative age of local government. A total of 55 financial statement of Local Governments District/City in Jambi province for 2011-2015 were selected to be sample with average of Local Governments financial statement disclosure level is 50,45%. The analysis method used is panel data regression using E-views 8 software . Results of this research shows that the total assets and BPK audit opinion have positive effect on the local government financial statement disclosure, while the size of the legislative and administrative age of the local government have a negative effect. Local revenues and the level of dependence on the central government proved to have no effect on the local government financial statement disclosure.*

*Keywords: Local Government Financial Report, Disclosure, Characteristics of Local Government, Number of Legislative Members, Audit Opinion of BPK.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah, jumlah anggota legislatif, dan opini audit BPK terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Jambi. Variabel karakteristik pemerintah daerah diproksikan dengan pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, total aset, dan umur administratif pemerintah daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2011-2015 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD sebesar 50,45%. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan perangkat lunak E-views 8. Hasil penelitian ini menemukan bahwa total aset dan opini audit BPK berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan jumlah anggota legislatif dan umur administratif pemerintah daerah berpengaruh negatif. Pendapatan asli daerah dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengungkapan, Karakteristik Pemerintah Daerah, Jumlah Anggota Legislatif, Opini Audit BPK.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik menjadi isu penting setelah reformasi. Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk menampilkan informasi yang berguna bagi pengguna untuk membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik (Mardiasmo, 2009). Tujuan laporan keuangan adalah untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah dari sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah dan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Pengungkapan laporan keuangan dalam pemerintah daerah Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia (Susbiyani, 2014).

Setiap tahunnya pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi cenderung mendapat opini WDP bahkan pada LKPD tahun 2015 dua dari sebelas kabupaten/ kota di Provinsi Jambi mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer*) dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi belum memenuhi kriteria yang telah disebutkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi belum memenuhi keempat aspek yang harus dipenuhi dalam pemberian opini atas LKPD, yaitu sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*).
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Beberapa penelitian menemukan bahwa tingkat pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia masih rendah yaitu penelitian Lesmana (2010) mengungkapkan bahwa rata-rata pengungkapan pada CaLK Pemerintah daerah tahun 2007 adalah sebesar 22%. Hilmi (2012) menemukan rata-rata pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia selama tahun 2006 hingga 2009 sebesar 44,56%. Khasanah (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012 dengan tingkat pengungkapan rata-rata yang lebih besar sebesar 59,99%. Susbiyani (2014) melakukan penelitian kepatuhan terhadap pengungkapan pernyataan wajib pada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2011 dan menemukan pengungkapan rata-rata sebesar 55,66%. Sedangkan untuk pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi sendiri dari tahun 2011-2013 rata-rata adalah 49,7%. Rata-rata pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

di Provinsi Jambi yang sebesar 49,7% ini masih dibawah rata-rata pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia pada tahun tersebut dan hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah yang menjadi dasar penyusunan tesis adalah “Bagaimanakah pengaruh karakteristik pemerintah daerah, jumlah anggota legislatif, dan opini audit BPK secara bersama-sama dan parsial terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi?”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### 2.1. Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Teori Agensi dalam Pemerintahan

Dalam *agency theory* terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut *agent* (Halim dan Abdullah 2006). *Agency problem* muncul ketika *principal* mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada *agent* (Zimmerman, 1977). Hubungan keagenan ini menimbulkan permasalahan, yaitu adanya informasi asimetris, dimana salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya.

Hubungan keagenan yang terjadi di pemerintahan adalah rakyat sebagai *agent* dan pemerintah sebagai *principal*. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh *agent*. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency problem*.

#### 2.1.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*) dalam Pemerintahan

Dalam konteks teori *signalling*, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat (Evans dan Patton, 1987 dalam Suryani, 2016). Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik. Pemerintah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih

lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan untuk kepentingan transparansi pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. Pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini akan meneliti sejauh mana pemerintah daerah mengungkapkan informasi keuangannya dalam laporan keuangan seperti yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan mencoba mencari hubungan antara karakteristik pemerintah daerah, jumlah legislatif, dan opini audit BPK dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan.

### **2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD**

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2004). Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lasward, et.al (2005) dalam Puspita (2011) berpendapat bahwa kekayaan daerah yang merupakan proksi dari pendapatan asli daerah (PAD) berhubungan positif dengan meningkatnya pengungkapan karena memberikan sinyal dari kualitas kepala daerah, dimana kepala daerah dapat mengambil manfaat dengan meningkatkan kesempatan mereka dipilih kembali dan mengurangi biaya kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Ingram (1984) menemukan bahwa tingkat kekayaan daerah (PAD) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan negara bagian Amerika Serikat. Hasil Hilmi (2012) menemukan bahwa kekayaan daerah (PAD) berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, semakin besar pendapatan asli daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya. Semakin besar kekayaan daerah (PAD), maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan.

### **2.2.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD**

Tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat di Indonesia tercermin dari besarnya dana perimbangan yang diberikan. Definisi dana perimbangan menurut Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Robbins dan Austin (1986) menemukan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya ketergantungan yang besar maka kemungkinan pemerintah pusat melakukan pembatasan operasi pemerintah daerah (kota) dan meminta pengungkapan lebih untuk memonitor kinerja pemerintah daerah (kota) dengan pembatasan operasi tersebut. Hal ini berarti semakin besar tingkat ketergantungan maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

### **2.2.3 Pengaruh Total Aset terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD**

Aset merupakan jumlah sumber daya yang dimiliki suatu entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas tersebut. Aset yang dimiliki juga dapat digunakan untuk pembuatan laporan keuangan entitas tersebut. Semakin besar jumlah aset maka semakin besar sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Tetapi, jumlah aset yang besar sering menjadi kendala dalam melaporkan laporan keuangan bagi pemerintah di Indonesia karena belum semua aset yang dimiliki pemerintah dicatat dengan baik. Sehingga semakin besar aset semakin sulit dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan (Hilmi, 2012). Penelitian yang dilakukan Heriningsih (2013) menunjukkan bahwa jumlah aktiva berkorelasi negatif tetapi dengan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Total aset memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam penelitian Puspita (2011). Perbedaan hasil ini dirasa peneliti perlu diambil sebagai variabel. Untuk membuktikan apakah total aset berpengaruh atau tidak terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

### **2.2.4 Pengaruh Umur Administratif Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD**

Umur suatu organisasi dapat diartikan sebagai seberapa lama organisasi tersebut berlangsung sejak didirikannya. Umur administratif pemda adalah tahun dibentuknya suatu pemerintahan daerah berdasarkan Undang- Undang pembentukan daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lebih lama akan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam

menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan SAP (Setyaningrum, 2012). Hammami (2009) dalam Setyaningrum (2012) menyatakan bahwa organisasi yang sudah lama berdiri dianggap memiliki kemampuan yang baik untuk mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dibandingkan dengan organisasi yang lebih muda atau baru didirikan, karena organisasi tersebut tidak memiliki "track record" sehingga hanya sedikit informasi yang diungkapkan. Penelitiannya menemukan bahwa umur berpengaruh secara signifikan dalam pengungkapan sukarela laporan keuangan. Lesmana (2010) juga menyatakan bahwa umur pemerintah daerah merupakan salah satu variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib LKPD. Semakin lama pemerintah daerah dibentuk, maka semakin berpengalaman dalam menjalankan sistem administrasinya termasuk proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

### 2.2.5 Pengaruh Jumlah Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD bertugas mengawasi Pemerintah Daerah agar dapat mengelola anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Secara umum, peran DPRD diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu: (a) regulator, mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintah pusat, (b) *policy making*, merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program di daerahnya, (c) *budgeting*, perencanaan anggaran daerah (APBD).

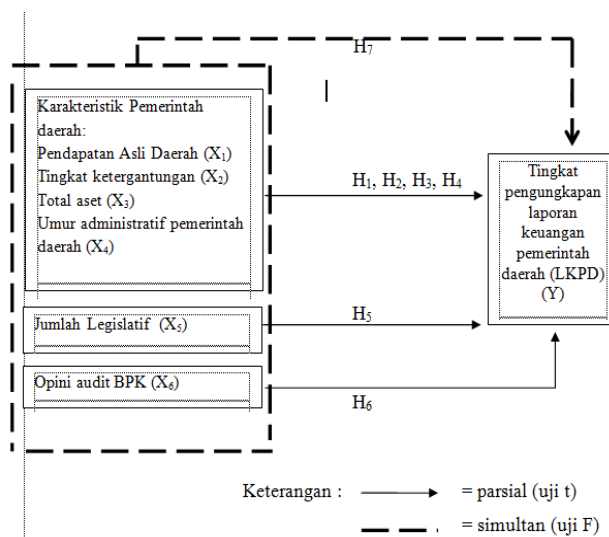
Yulianingtyas (2011) menemukan bahwa ada pengaruh positif ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan semakin dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah sehingga adanya peningkatan pada pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Variabel jumlah legislatif ditambahkan dalam penelitian ini karena sebagai perwakilan rakyat, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik.

### 2.2.6 Pengaruh Opini audit BPK terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Opini BPK dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah (Marfiana dan Kurniasih, 2013). Opini diberikan oleh BPK sebagai penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah

Daerah yang bebas dari salah saji. Adanya opini WTP berarti bahwa pemerintah daerah memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya opini tersebut maka Pemerintah daerah akan berusaha memberikan penyajian LKPD yang lebih luas untuk memberikan kesan yang baik mengenai kinerja pemerintah daerah tersebut. Pengungkapan yang lebih dilakukan sebagai upaya perbaikan dan koreksi atas temuan audit yang ditemukan BPK dan menunjukkan pada publik adanya perbaikan kualitas yang dilakukan pemerintah daerah atas saran dari BPK (Khasanah, 2014). Dengan demikian, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan, total aset, jumlah legislatif, umur administratif pemerintah daerah, dan opini audit BPK.

**Gambar. 1**  
**Model Penelitian**



### 2.3. Hipotesis

Berdasarkan model penelitian maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- H<sub>1</sub>: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
- H<sub>2</sub>: Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
- H<sub>3</sub>: Total aset berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
- H<sub>4</sub>: Umur administratif pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

- H<sub>5</sub>: Jumlah legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
- H<sub>6</sub>: Opini audit BPK berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
- H<sub>7</sub>: Pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan, total aset, umur administratif pemerintah daerah, jumlah legislatif, dan opini audit BPK secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

- AGE = Umur administratif pemerintah daerah  
 = Opini audit BPK
- OPIN = Konstanta
- $\beta_0$  = Koefisien regresi
- $\beta_{1,2,3,4,5,6}$  = Standar eror
- e = Urutan waktu (*time series*)
- t = Urutan kabupaten/kota yang diteliti
- i

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menguji tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jambi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu karakteristik pemerintah daerah, jumlah anggota legislatif, dan opini audit BPK. Karakteristik pemerintah daerah di proksikan dalam bentuk pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, total aset, dan umur administratif pemerintah daerah. Sumber data yang diperoleh berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jambi. Periode data yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2011-2015.

#### 3.2 Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Tingkat pengungkapan LKPD yang dimaksud adalah perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam LKPD dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah karakteristik pemerintah daerah (pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, total aset, umur administratif pemerintah daerah), jumlah legislatif, dan opini audit BPK.

Penelitian ini diuji dalam sebuah model regresi berikut ini:

$$DISC_{it} = \beta_0 + \beta_1 WEALTH_{it} + \beta_2 DEPEND_{it} + \beta_3 ASSET_{it} + \beta_4 AGE_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \beta_6 OPIN_{it} + e$$

Keterangan:

- DISC = Tingkat pengungkapan LKPD
- WEALTH = Pendapatan asli daerah
- DEPEND = Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat
- ASSET = Total aset

Dalam pengujian data panel, terdapat tiga metode regresi yaitu *pooled least square*, *fixed effect*, dan *andom effect*. Berdasarkan *Chow test*, metode yang dipilih antara *common effect* dan *fixed effect* adalah *common effect*. Berdasarkan hasil pengujian *Hausman test*, metode yang dipilih antara *fixed effect* dan *random effect* adalah *random effect method*, sehingga harus dilakukan uji ketiga yaitu pengujian *LM test*, metode yang dipilih antara *common effect* dan *random effect*. Hasil dari ketiga pengujian diatas, maka metode yang digunakan dalam model penelitian ini adalah *common effect*.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Statistik Deskriptif

Tabel. 1  
Statistik Deskriptif

	DISC	WEALTH	DEPEND	ASSET	AGE	SIZE	OPIN
Mean	0.504598	10.69208	0.926021	12.27894	1.430190	1.498903	4.109091
Median	0.508264	10.64966	0.933538	12.29580	1.672098	1.477121	4.000000
Maximum	0.627907	11.42148	0.967614	12.56288	1.845098	1.653213	5.000000
Minimum	0.348837	10.15704	0.803978	11.62903	0.477121	1.301030	1.000000
Std. Dev.	0.051553	0.254369	0.036009	0.171520	0.377357	0.074751	0.737180
Skewness	-0.516398	0.664031	-1.742677	-1.399747	-0.605989	-0.262093	-2.410758
Kurtosis	3.517661	3.667240	6.141117	6.344309	2.239716	4.658158	12.41881
Jarque-Bera	3.058551	5.062194	50.44945	43.59110	4.690861	6.930596	256.5775
Probability	0.216693	0.079572	0.000000	0.000000	0.095806	0.031264	0.000000
Sum	27.75287	588.0645	50.93117	675.3417	78.66046	82.43969	226.0000
Sum Sq. Dev.	0.143515	3.493996	0.070017	1.588636	7.689518	0.301737	29.34545
Observations	55	55	55	55	55	55	55

Sumber: *output eviews 8*

Jumlah sampel atau N data valid yang diteliti adalah 55 sampel. Tingkat pengungkapan (DISC) memiliki nilai rata-rata sebesar 50.45%, standar deviasi sebesar 5.15%, nilai minimum sebesar 34.88% terdapat pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015, dan nilai maksimum sebesar 62.79% terdapat pada Kota Sungai Penuh tahun 2015. Pendapatan asli daerah (WEALTH) memiliki nilai rata-rata sebesar 10.692, standar deviasi sebesar 0.254, nilai minimum sebesar 10.157 terdapat pada Kotamadya Sungai Penuh tahun 2011, dan nilai maksimum sebesar 11.421 terdapat pada Kota Jambi tahun 2015 nilai ini didapatkan dari nilai log Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat

ketergantungan terhadap pemerintah pusat (DEPEND) memiliki nilai rata-rata sebesar 92.60%, standar deviasi sebesar 3.60%, nilai minimum sebesar 80.39% terdapat pada Kota Jambi tahun 2015, dan nilai maksimum sebesar 96.76% terdapat pada Kota Sungai Penuh tahun 2011. Total aset (ASSET) memiliki nilai rata-rata sebesar 12.278, standar deviasi sebesar 0.171, nilai minimum sebesar 11.629 terdapat pada Kota Sungai Penuh tahun 2011, dan nilai maksimum 12.562 terdapat pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 nilai ini didapatkan dari nilai log total aset pemerintah daerah. Umur administratif pemerintah daerah (AGE) memiliki nilai rata-rata sebesar 1.430, standar deviasi sebesar 0.377, nilai minimum sebesar 0.477, dan nilai maksimum sebesar 1.845 nilai ini didapatkan dari nilai log umur administratif pemerintah daerah. Jumlah legislatif (SIZE) memiliki nilai rata-rata sebesar 1.498, standar deviasi sebesar 0.074, nilai minimum sebesar 1.301 terdapat pada Kotamadya Sungai Penuh, dan nilai maksimum sebesar 1.653 terdapat pada Kota Jambi nilai ini didapatkan dari nilai log jumlah anggota legislatif. Opini audit BPK (OPIN) memiliki nilai rata-rata sebesar 4.1090, standar deviasi sebesar 0.737, nilai minimum sebesar 1.00 dan nilai maksimum sebesar 5.00.

#### 4.2. Hasil Uji Statistik F

**Tabel. 2**  
**Hasil Uji Statistik F**

R-squared	0.380032	Mean dependentvar	0.504598
Adjusted R-squared	0.302536	S.D. dependentvar	0.051553
S.E. of regression	0.043054	Akaike info criterion	-3.334314
Sum squared resid	0.088975	Schwarz criterion	-3.078835
Log likelihood	98.69363	Hannan-Quinn criter.	-3.235518
F-statistic	4.903894	Durbin-Watson stat	1.760506
Prob(F-statistic)	0.000556		

Sumber: *output Eviews 8*

Nilai probabilitas F (*Statistic*) sebesar 0.000556 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah (WEALTH), tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat (DEPEND), total aset (ASSET), umur administratif pemerintah daerah (AGE), jumlah legislatif (SIZE), dan opini audit BPK (OPIN) terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (DISCLOSURE) dan ini juga berarti bahwa  $H_7$  dapat diterima.

#### 4.3. Hasil Uji Statistik t

**Tabel. 3**  
**Hasil Uji Statistik t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probabilitas
C	-1.806874	0.882113	-2.048348	0.0460
WEALTH	0.104493	0.067210	1.554733	0.1266
DEPEND	0.020763	0.385773	0.053822	0.9573
ASSET	0.137535	0.052902	2.599786	0.0124
AGE	-0.043227	0.021113	-2.047429	0.0461
SIZE	-0.402064	0.140786	-2.855849	0.0063
OPIN	0.036672	0.009043	4.055195	0.0002

Dari enam variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, terdapat empat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Total aset (ASSET), umur administratif pemerintah daerah (AGE), jumlah legislatif (SIZE), dan opini audit BPK (OPIN) memiliki nilai signifikan kurang dari 5% (0,05) yaitu 0.0124, 0.0461, 0.0063, dan 0.0002. Sedangkan variabel-variabel lainnya yaitu pendapatan asli daerah (WEALTH), dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat (DEPEND) dengan nilai signifikan di atas 5% (0,05) tidak memiliki pengaruh pada tingkat pengungkapan LKPD.

##### 4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik t diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah (WEALTH) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sendiri masing-masing masih tergolong rendah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah nasional yang ditemukan dalam penelitian Hilmi (2012). Pendapatan asli daerah rata-rata Kabupaten/Kota di provinsi Jambi dari tahun 2011-2015 adalah sebesar Rp192.334/jiwa, masih jauh di bawah pendapatan asli daerah rata-rata nasional yang ditemukan Hilmi (2012) yaitu sebesar Rp. 643.647,1/jiwa. Selain itu terjadi kesenjangan yang cukup jauh pendapatan asli daerah Kotamadya Sungai Penuh dengan Kota Jambi. Selain itu juga tahun 2011 sampai dengan 2015, laju pertumbuhan target penerimaan PAD Provinsi Jambi bervariasi seperti yang diungkapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi Jambi tahun 2016. Dapat disimpulkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat belum bisa memotivasi pemerintah untuk dapat melakukan pengungkapan yang sesuai dengan SAP. Hal ini diperkuat dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang telah

dijelaskan sebelumnya dimana jumlah PAD yang kecil, tingkat kesenjangan yang cukup tinggi, dan laju pertumbuhan yang kurang baik mengakibatkan kurangnya motivasi terhadap pemerintah dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan karena tidak memberi tekanan terhadap pemerintah.

#### **4.3.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat tahun 2011-2015 tergolong sangat tinggi yaitu sebesar 92,65% dibandingkan dengan tingkat ketergantungan pemerintah daerah rata-rata di Indonesia yang ditemukan Hilmi (2012) yaitu sebesar 59,07%. Tetapi tiap tahunnya terjadi tren penurunan rata-rata tingkat ketergantungan pemerintah daerah di provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat.

Dalam era desentralisasi hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak terlalu erat sehingga tidak ada monitoring khusus pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, jika ada monitoring tersebut tidak digunakan dalam menentukan anggaran dana perimbangan di daerah sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Insentif pelaporan keuangan baru diberikan mulai tahun 2010, namun lebih diarahkan pada pencapaian opini bukan kualitas pengungkapan laporan keuangan selain itu terjadi tren penurunan angka tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2011-2015 juga menyebabkan tidak berpengaruhnya variabel tingkat ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **4.3.3 Pengaruh Total Aset terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel total aset berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Khasanah (2014) total aset yang besar dan kompleks akan membutuhkan pengelolaan aset yang baik sehingga pengungkapan lebih besar diperlukan terkait pemeliharaan dan pengelolaan aset. Kondisi ini juga berlaku pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, ditunjukkan dengan seringnya permasalahan aset menjadi temuan audit BPK seperti pada tahun 2015 terdapat dua Kabupaten/Kota yang mendapat opini *disclaimer* dari BPK yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi. Permasalahan aset menjadi perhatian publik, dengan adanya jumlah aset yang besar semakin memberikan tekanan kepada pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan secara lengkap sehingga dapat disimpulkan variabel total aset sangat

mempengaruhi pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **4.3.4 Pengaruh Umur Administratif Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel umur administratif pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang menunjukkan umur administratif pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah koefisien negatif sesuai dengan teori *signalling*, dimana pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat. Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik. Pemerintah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Hal ini juga berlaku untuk umur administratif pemerintah daerah yang baru seperti pada Kotamadya Sungai Penuh dimana diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi tahun 2011-2015, pemerintah Kota Sungai Penuh selalu mendapatkan opini BPK yang baik terbukti dari lima periode tersebut sebanyak tiga kali Kota Sungai Penuh mendapatkan opini WTP dan dua kali opini WDP hal ini berarti pemerintah dengan umur administratif yang baru tetap berusaha memberikan sinyal kinerja yang baik kepada masyarakat salah satunya dengan cara meningkatkan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **4.3.5 Pengaruh Jumlah Anggota Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota legislatif berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh jumlah anggota legislatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan dengan tanda koefisien yang negatif ini menandakan bahwa jumlah anggota legislatif Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi yang banyak tidak diikuti adanya fungsi dan peran yang semakin baik pula. Sehingga fungsi pengawasan yang seharusnya dimiliki anggota DPRD tidak bisa dimaksimalkan. Banyaknya isu tentang korupsi yang dilakukan anggota DPRD juga turut menyumbang alasan atas penurunan kinerja pemerintah yang kemudian berdampak pula pada penurunan kinerja atas tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas dari anggota

legislatif lebih diutamakan daripada kuantitas anggota legislatif agar tercapainya fungsi pengawasan yang baik dalam pemerintahan.

#### 4.3.6 Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel opini audit BPK berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para *stakeholders* (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP, tingkat kepercayaan atas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan. Untuk memperoleh opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas sistem pengendalian intern (Utama, 2013). Hasil penelitian yang menunjukkan semakin baik opini yang diperoleh pemerintah daerah akan meningkatkan tingkat pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah pada laporan keuangannya, hal ini terlihat dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi yang memperoleh opini *disclaimer* pada tahun 2015 adalah dua pemerintah daerah yang melakukan pengungkapan pada laporan keuangan paling rendah yaitu sebesar 34,88% dan 41%.

#### 4.3.7 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat, Total Aset, Jumlah Anggota Legislatif, dan Umur Administratif Pemerintah Daerah secara Simultan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, total aset, umur administratif pemerintah daerah, jumlah anggota legislatif, dan opini audit BPK secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0.0005 yang lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian  $H_7$  yang menyatakan pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, total aset, umur administratif pemerintah daerah, jumlah anggota legislatif, dan opini audit BPK secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah diterima ( $H_7$  diterima). Keenam variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 38.003%,

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

#### 4.4. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai R-Square besarnya 0,380032 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel pendapatan asli daerah (WEALTH), tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat (DEPEND), total aset (ASSET), umur administratif pemerintah daerah (AGE), jumlah anggota legislatif (SIZE), dan opini audit BPK (OPIN) terhadap variabel tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (DISC) sebesar 38,003%. Sedangkan sisanya 61,997% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam model regresi ini.

### 5. SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, total aset, umur administratif pemerintah daerah, jumlah anggota legislatif, dan opini audit BPK terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti pendapatan asli daerah tidak menyebabkan peningkatan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
2. Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat tidak menyebabkan peningkatan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
3. Total aset berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti jumlah aset yang dimiliki suatu daerah menyebabkan peningkatan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
4. Umur administratif pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti umur administratif pemerintah daerah menyebabkan peningkatan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
5. Jumlah anggota legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti jumlah anggota legislatif menyebabkan peningkatan tingkat pengungkapan



laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.

6. Opini audit BPK berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti opini audit BPK menyebabkan peningkatan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
7. Pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, total aset, umur administratif pemerintah daerah, jumlah anggota legislatif dan opini audit BPK secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Keenam variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 38,003%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi..

## 5.2. Saran

Dalam penelitian ini menemukan bahwa beberapa karakteristik pemerintah daerah, jumlah anggota legislatif dan opini audit BPK terbukti mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD, yaitu total aset, jumlah anggota legislatif, umur administratif pemerintah daerah, dan opini audit BPK untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- Aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus bisa memotivasi pemerintah untuk melakukan pengungkapan lebih, semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu daerah harus dibarengi dengan peningkatan pengungkapan pada LKPD.
- Kualitas dari anggota legislatif harus lebih diperhatikan agar fungsi pengawasan legislatif dapat berjalan maksimal sehingga nantinya akan berdampak pada tingkat pengungkapan yang meningkat.
- Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif baik yang sudah lama terbentuk maupun yang baru terbentuk tetap harus memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat salah satu sarana pemerintah untuk menunjukkan kinerjanya adalah dengan penyajian laporan keuangan yang memenuhi empat kriteria laporan keuangan yang baik, salah satunya adalah melakukan pengungkapan penuh.
- Opini audit dari BPK yang diperoleh pemerintah daerah bisa menjadi motivasi dan masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja maupun penyajian laporan keuangannya.

Variabel tersebut diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan data laporan keuangan pemerintah daerah yang paling baru dengan waktu pengamatan yang lebih panjang sehingga

lebih terlihat perkembangan tingkat pengungkapannya sekaligus bisa mengurangi masalah-masalah saat pengolahan data.

## DAFTAR REFERENSI

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Chariri, Anis dan Imam Ghozali. 2003. *Teori Akuntansi*. Semarang: BP UNDIP.
- Fatimah, Desi., Ria Nelly Sari., dan M. Rasuli. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia*. Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1.
- Fadzil, Hanim Faudziah., dan Nyoto Harryanto. 2011. *Fiscal Decentralization After Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia*. World Review of Bussines Research (Vol. 1, No. 2; 51-70)
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (Edisi Kelima)*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No. 1
- Hermawan, Asep. 2005. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. PT. Grasindo: Jakarta.
- Heriningsih, Suchyo dan Rusherlistyani. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 13.
- Hendriksen, Eldon S. dan Vanbreda Michael F. 2002. *Teori Akunting. Edisi Kelima, Buku 2. Terjemahan dari Herman Wibowo dari Accounting Theory*. Jakarta: Penerbit Interaksara.
- Hilmi, Amirudin Zul dan Dwi Martani. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi.
- Ingram, R. W. 1984. *Economic Incentives and The Choice of State Government Accounting Practices*. Journal of Accounting Research. Vol 22.
- Istijanto. 2009. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. PT. Gramedia Pustaka: Jakarta.
- Kawedar, Warsito. 2009. *Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus di Kabupaten PWJ Yang Mengalami Penurunan Opini Audit)*. Jurnal Akuntansi dan Auditing.

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/issue/view/25.Vol6>, No 1

- Laswad, et.al . 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy. Vol 24, pp 101-121.
- Lesmana, Sigit I. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mandasari, Putriesti. 2009. *Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesian Local Government*. Tesis Universitas Sebelas Maret.
- Marfiana, Nandhya., dan Lulus Kurniasih. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Jurnal Universitas Sebelas Maret.
- Mustikarini, Widya Astuti., Fitriasari, Debby. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin
- Na'im, Ainun dan Fuad Rakhman. 2000. *Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 15 No. 1. pp 70-82
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis (Edisi Pertama)*. BPF: Yogyakarta.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Puspita, Rora dan Dwi Martani. 2011. *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2003). Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- \_\_\_\_\_. (2004). Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2005). Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. (2007). Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2010). Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. (2014). Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Robbins, Walter A., dan Austin, Kenneth R. 1986. *Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure*. Journal of Accounting Research, Vol. 24. No. 2 pp. 412-421
- Rochmatullah, Mahameru Rosy dan Agung Nur Probodono. 2014. *Praktik Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII. Universitas Mataram, Lombok.
- Scott, William R. 2003. *Financial Accounting Theory, Third Edition*. Prentice Hall, Toronto, Canada.
- Sekaran, Uma dan Bougi, R. 2010. *Research Methods for Business a Skill Building Approach 5th Edition*. John Willey & Sons ltd: United Kingdom.
- Setyaningrum, Dyah dan Febriyani Syafitri. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 9 Nomor 2, Desember 2012
- Suhardjanto, Djoko dan Laras Miranti. 2009. *Indonesian Environmental Reporting Index dan Karakteristik Perusahaan*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia. Vol. 13, No. 1.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial*. PT Kompas Media Nusantara: Jakarta.
- Suryani, Lilis. 2016. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Pengawasan Legislatif, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Provinsi, Kabupaten, Kota Tahun 2014*. Tesis Universitas Lampung.
- Susbiyani, Arik. Bambang Subroto, Sutrisno, Bambang Purnomosidhi. 2014. *The Compliance with Mandatory Disclosure of Financial Statement: A Study from Local Government in Indonesia*. Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.5, No.10, 2014.
- Utama, Muhammad Fuat W. 2013. *Upaya Pemerintah Daerah Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI*. Jurnal Pusdiklatwas.
- Winarno, Wing Wahyu. 2011. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Edisi ketiga. STIM YKPN Yogyakarta.
- Yulianingtyas, Rena Rukmita., Suhardjanto, Djoko. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di*

*Indonesia*). Jurnal Akuntansi&Auditing.  
Volume 8/No.1/November 20011: 1-194

[www.junaidichaniago.wordpress.com](http://www.junaidichaniago.wordpress.com)